

Dampak Program Bantuan PKL Terhadap Tingkat Motivasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Provinsi Sumatera Barat

Oleh: Syamsir

ABSTRACT

The objectives of this study are 1) to describe the level of motivation Retailers/Peddlers in West Sumatera in running their bussiness as a Retailer/Peddler and 2) to identify the impact of Loan for Retailer program toward the retailers' motivation in running their bussiness as a Retailer/Peddler. This study was conducted in three regions of cities in the area of West Sumatera province, namely Padangpanjang, Bukittinggi, and Payakumbuh. A qualitative method through field study was used in this study. Data were collected though structured and depth-interview, observation, questionnaire, and study of documentation. There are 434 Retailers/Peddlers covered in this study. Quantitative data from questionnaire were analyzed with frequency and percentage while qualitative data from informants and observation were analyzed through the model of interactive analysis. The finding of this study indicated that the loan for retailer program did not have so significant impact for increasing motivation of the retailers/peddlers in running their bussiness.

Kata Kunci: Program Bantuan PKL, Pedagang Kaki Lima (PKL), Program Registrasi PKL, Motivasi

I. PENDAHULUAN

Era globalisasi dan krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia dalam dua dasawarsa ini telah banyak menimbulkan masalah dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sulitnya mencari pekerjaan dan banyaknya karyawan yang diPHK merupakan kenyataan yang banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pemecahan masalah paling sederhana yang muncul dari pemikiran sekelompok masyarakat kecil untuk bertahan hidup adalah dengan cara menjajakan berbagai jenis barang dagangan,

makanan, atau minuman dalam skala kecil. Kelompok masyarakat inilah yang sekarang lebih sering dikenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Profesi atau pekerjaan sebagai pedagang kaki lima memang sangat dilematis. Di satu sisi menjadi pedagang kaki lima merupakan usaha untuk menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun di sisi lain sebagai aktifitas usaha yang menggunakan ruang publik, pedagang kaki lima seringkali harus berhadapan dengan peraturan daerah setempat yang pada umumnya melarang orang

berjualan di tempat-tempat yang seharusnya digunakan oleh masyarakat umum, seperti trotoar dan badan jalan. Sehingga penyitaan dalam operasi penertiban yang dilakukan oleh petugas merupakan sesuatu yang sangat ditakuti tapi tidak bisa dihindari oleh pedagang kaki lima.

Sementara itu, upaya pemerintah kota dalam menata keberadaan PKL selama ini seringkali mengundang reaksi dari para PKL yang akan ditertibkan, bahkan jauh sebelum pelaksanaan penertiban dilakukan. Bagi para PKL, operasi penertiban, pengusuran, dan penggarukan sesungguhnya bukan merupakan hal yang sama sekali baru sehingga jangankan untuk menaati, malah mereka cenderung melakukan resistensi atau mencoba menyalahi situasi dan bahkan mereka tidak jarang “kucing-kucingan” dengan para petugas keamanan dan ketertiban (Trantib).

Selama ini, setiap pemerintah Kabupaten/Kota telah mengembangkan infrastruktur perekonomian. Namun dalam pengembangan infrastruktur perekonomian tersebut, seringkali masalah PKL tidak diperhatikan. Padahal pengaturan pedagang, termasuk PKL, sebaiknya diatur dalam lingkup pemerintah daerah. Seperti praktek di beberapa kota besar di negara maju, saat ini jumlah PKL cukup besar dan memiliki potensi yang dapat menyediakan lapangan kerja dalam masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam mengatur dan menangani Pedagang Kaki Lima (PKL) hendaklah diposisikan sebagai

komponen yang mengayomi dan melindungi.

Namun dalam kenyataannya Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dipandang sebagai pembuat masalah (*trouble maker*) dan bukan sebagai bagian dari solusi untuk membantu Pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan mandiri ataupun sebagai *safety belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja. Mereka masih sering dituding sebagai *kambing hitam* dan penyebab terjadinya kesemrawutan lalu lintas atau penyebab pencemaran (kekotoran) lingkungan.

Sebenarnya kalau direnungkan secara lebih mendalam, peranan PKL sungguh sangat penting dan amat membantu masyarakat konsumen karena mereka dapat berbelanja murah dan mudah didapatkan disamping mengurangi angka pengangguran yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Oleh karena itu program pemberdayaan PKL merupakan salah satu langkah yang sangat tepat untuk dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan dan kondisi di atas Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Barat telah meluncurkan Program Registrasi PKL di provinsi Sumatera Barat yang dimulai sejak tahun 2008, 2009, 2010, dan akan dilanjutkan pada tahun 2011. Tujuan program Registrasi PKL tersebut antara lain¹: 1) Memberdayakan PKL melalui Koperasi sehingga PKL yang dibina memiliki kepastian berusaha; 2) Meningkatkan peran Koperasi dalam pengembangan serta pengelolaan sarana usaha PKL;

¹ Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat. 2009. *Forum Koperasi*. Edisi. Juli, 2009 .

3) Memberikan contoh/model bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam pengembangan sarana usaha PKL melalui Koperasi; dan 4) Mengevaluasi tingkat perkembangan usaha (kemajuan usaha dapat diukur).

Seiring dengan program Registrasi PKL ini pihak Koperindag Provinsi Sumatera Barat telah memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada para PKL yang telah diregistrasi sebanyak Rp. 300.000,- per PKL melalui koperasi masing-masing daerah (Kota/Kabupaten) untuk program registrasi tahun 2008. Program registrasi dan pemberian bantuan untuk tahun 2008 ini meliputi para PKL di lima (5) kota/kabupaten, yaitu: Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padangpanjang, Kota Batusangkar, dan Kota Sawahlunto. Bantuan (pinjaman) ini diharapkan akan dapat memotivasi dan lebih memberdayakan para PKL dalam meningkatkan atau mengembangkan usahanya di masa yang akan datang. Namun, agar program pemberian bantuan PKL yang telah dilakukan oleh Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan memotivasi para PKL maka perlu dilakukan evaluasi terhadap efektifitas dan kemanfaatan dari program yang telah diterapkan tersebut.

Untuk itu suatu penelitian telah dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana dampak program pemberian bantuan PKL terhadap tingkat motivasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini antara lain bertujuan untuk: 1) mengetahui gambaran tingkat motivasi para Pedagang Kaki

Lima (PKL) Sumatera Barat dalam menjalani pekerjaan mereka sebagai PKL dan 2) mengidentifikasi dampak pemberian bantuan PKL terhadap peningkatan motivasi para PKL dalam menjalani pekerjaan mereka sebagai PKL.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Motivasi PKL

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, di tempat umum, baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melaksanakan kegiatan usaha dagang. Tempat usaha PKL adalah tempat umum, yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar, dan lapangan serta tempat lain di atas tanah yang bukan miliknya atau di atas tanah milik negara yang ditetapkan oleh pemerintah kota.

Dengan kata lain PKL adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya. Sementara definisi lain menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan informal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak atau peralatan bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan.

PKL pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) PKL yang *mobile*, yaitu PKL yang

berdagang secara tidak menetap; 2) PKL yang tidak *mobile* yaitu PKL yang berdagang secara menetap; dan 3) PKL *static knock down*, yaitu PKL yang menggelar barang dagangannya pada waktu dan tempat tertentu².

Pengalaman negara-negara berkembang di dunia menunjukkan bahwa pada umumnya Pedagang Kaki Lima (PKL) terdiri dari para migran³. Kecenderungan tersebut juga dapat dilihat pada PKL yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, implikasi dari kecenderungan tersebut adalah terjadinya hubungan kuat antara pedagang kaki lima dan migrasi. Dengan demikian, selagi terjadi kesenjangan sosial-ekonomi antara desa dan kota, maka selama itu pula akan terus terjadi arus migrasi desa-kota (urbanisasi) yang merupakan sumber muka-muka baru bagi PKL.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu profesi atau pekerjaan informal yang terdapat hampir di setiap kota dan di setiap negara manapun. Menurut Bromley⁴, Pedagang Kaki Lima merupakan kelompok tenaga kerja yang cukup banyak jumlahnya di sektor informal. Jenis pekerjaan tersebut penting dan relatif luas dalam sektor informal. Menurut pandangannya, pekerjaan Pedagang Kaki Lima merupakan

jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.

Pedagang kaki lima pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas PKL terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif kecil, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi. Menurut Mulyanto⁵ PKL termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (*profit*) layaknya sebuah kewirausahaan (*entrepreneurship*). PKL mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya agar mendapatkan keuntungan. PKL menjadi manajer tunggal yang menangani usahanya mulai dari perencanaan usaha, menggerakkan usaha sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahanya. Padahal fungsi-fungsi manajemen tersebut jarang atau tidak pernah mereka dapati dari pendidikan formal. Manajemen usahanya berdasarkan pada pengalaman dan alur pikir mereka yang otomatis terbentuk sendiri berdasarkan arahan ilmu manajemen pengelolaan usaha. Hal inilah yang disebut *learning by experience* (belajar dari pengalaman).

Motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya, sehingga terdapat perbedaan dalam kekuatan

² Amidi, 2003 dalam Mulyanto. 2007. "Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survai pada Pusat Perdagangan dan Wisata di Kota Surakarta)" dalam *Jurnal BENEFIT*, Vol. 11, No. 1, Juni 2007.

³ Manning dan Effendi, Tadjudin Noer. 1992: *Perilaku Mobilitas dan Struktur Sosial Ekonomi Rumah Tangga: Kasus Dua Desa di Jawa Barat*, Yogyakarta: PPK UGM.

⁴ Bromley dalam Mulyanto. 2007. *Opcit.*

⁵ Mulyanto. 2007.

motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi tertentu dibandingkan dengan orang lain yang menghadapi situasi yang sama⁶. Para ahli manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi memberikan definisi atau konsep mengenai motivasi dengan ungkapan berbeda-beda, namun makna yang terkandung sama, yaitu bahwa motivasi adalah keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan, dan insentif.

Dalam kaitannya dengan PKL, setidaknya ada tiga hal yang menjadi faktor pendorong kenapa orang termotivasi menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). *Pertama*, mencari terobosan dalam menghadapi jalan buntu untuk mencari kesempatan kerja. *Kedua*, sektor pedagang kaki lima memang memberikan daya tarik tersendiri, *Ketiga*, merupakan gabungan dari keda pertimbangan di atas. Pengalaman di Afrika, misalnya, memberkan petunjuk akan hal ini. Di Afrika pengusaha sektor-sektor informal banyak diminati oleh para pendatang baru di kota, karena sektor informal memberikan kesempatan yang berarti kepada kaum migran untuk berwiraswasta⁷

Kecenderungan tersebut juga tampak pada PKL di Indonesia. Hasil penelitian Ali Djoefri Chozin Soen'an⁸ di Yogyakarta mencatat

bahwa motivasi seseorang untuk menjadi PKL adalah karena kesulitan mendapat lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan/skill yang dimiliki (77,9%) dan karena memberikan pendapatan yang relatif cukup bagi kehidupan keluarga (74,29%).

Disamping itu, hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Pedagang Kaki Lima di Manahan Surakarta mengungkapkan bahwa ada pengaruh antara modal usaha, jam kerja, lama usaha dan sikap usaha atau kewirausahaan terhadap pendapatan PKL dan faktor modal usaha merupakan faktor yang dominan mempengaruhi pendapatan. Sementara hasil penelitian tentang pengaruh modal usaha dan perilaku kewirausahaan terhadap laba usaha Pedagang Kaki Lima makanan dan minuman di pasar Gemolong Kabupaten Sragen juga mengungkapkan bahwa modal usaha dan perilaku kewirausahaan berpengaruh positif terhadap laba usaha pedagang kecil makanan dan minuman di Pasar Gemolong Sragen. Secara keseluruhan variabel modal usaha dan perilaku kewirausahaan memberikan sumbangan sebesar 42,4% terhadap laba usaha⁹.

Hasil penelitian Diah Ayu Ardiyanti¹⁰ mengenai kehidupan

Lima dalam Pemasaran". Laporan Penelitian: UGM Yogyakarta.

⁶ Siagian, P. Sondang. 1997. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁷ Sethuraman, S.V. 1981. *The Urban Informal Sector in Developing Countries, Poverty, and Environment*. Chapter 14, Geneva: ILO.

⁸ Ali Djoefri Chozin Soen'an. 1992. "Perilaku Sektor Informal Pedagang kaki

⁹ Wardoyo. 2008. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Manahan Surakarta" <http://www.osun.org/usaha+kaki+lima-doc.html> diakses tanggal 12 November 2009).

¹⁰ Diah Ayu Ardiyanti. 2006. "Kehidupan Pedagang Kaki Lima dalam Meraih Keberhasilan Mempertahankan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pedagang Kaki

pedagang kaki lima dalam meraih keberhasilan mempertahankan ekonomi keluarga (studi kasus pedagang kaki lima di Sekitar GOR Manahan Surakarta tahun 2005-2006) juga mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha pedagang kaki lima di sekitar GOR Manahan Kota Surakarta tahun 2006 antara lain terdiri dari faktor eksternal meliputi: (1) Modal usaha ini digunakan untuk mengembangkan usaha; (2) Persaingan memberikan motivasi untuk mencapai keberhasilan; (3) Lokasi usaha yang strategis mampu meningkatkan jumlah pendapatan; (4) Peraturan Pemerintah memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.

Selanjutnya, motivasi kerja yang tinggi serta kemampuan manajerial yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha PKL, dimana dengan semakin meningkatnya kinerja usaha dan kesejahteraan PKL diharapkan akan dapat memotivasi masyarakat lain untuk mencontoh atau merencanakan usaha sesuai kemampuan yang mereka miliki, sehingga hal itu akan dapat meningkatkan peluang kerja di sektor informal yang pada gilirannya dapat menanggulangi tingkat pengangguran. Langkah pembinaan PKL sebagaimana diatur dalam berbagai Peraturan Daerah maupun Keputusan Walikota diharapkan akan dapat memotivasi PKL dalam menjalankan profesinya dengan baik, sehingga selanjutnya hal itu akan dapat mengurangi tingkat

pengangguran. Karena saat ini PKL sebagai sektor usaha informal merupakan usaha kerakyatan yang terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi sebagai katup-katup pengaman ekonomi.

Eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Pembangunan Ekonomi Global

Persaingan bisnis di era globalisasi saat ini semakin terasa dan mengkhawatirkan, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Artinya, pertarungan yang tak seimbang seringkali terjadi antara kalangan UMKM berhadapan dengan pemodal besar. Salah satu indikatornya adalah hadirnya sejumlah *hypermarket* atau *supermarket* di tengah-tengah pasar-pasar tradisional yang dihuni oleh para pemodal kecil dan menengah. Kehadiran para pemodal besar dengan *supermarketnya* seakan tidak dapat dibendung. Sementara selera pasar sebagian masyarakat Indonesia sudah mulai terjebak dan cenderung terpengaruh oleh gaya, pola, gengsi belanja ala *swalayan* yang ditawarkan oleh *supermarket*. Kondisi ini pada suatu saat jelas akan membuat produk usaha rakyat menjadi semakin terpinggirkan dan kesempatan berusaha para pedagang kecil dan menengah, terutama PKL, akan semakin terbatas.

Sebagai salah satu negara yang berada dalam lingkup era globalisasi, Indonesia sulit untuk mengelakkan diri dari pengaruh dan arus globalisasi itu. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyikapi serangan globalisasi itu dengan arif dan bijak. Salah satu

Lima di Sekitar GOR Manahan Surakarta tahun 2005-2006)" Laporan Penelitian.

kebijakan yang penting untuk diterapkan adalah membangkitkan kembali semangat kebersamaan yang disertai dengan sikap mencintai produk lokal dan dilandasi dengan semangat nasionalisme yang tinggi, serta memberdayakan para pengusaha kecil dan menengah yang secara nyata memiliki potensi *entrepreneurship*¹¹.

Dalam era globalisasi bisa saja perusahaan raksasa dunia akan mendominasi semua kegiatan bisnis, termasuk usaha kecil dan menengah. Meskipun keberadaan mereka penting namun bila koperasi dan usaha kecil menengah tidak diberikan ruang gerak dan dibina secara serius maka upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran akan tetap sulit. Solusinya antara lain adalah bahwa ke depan koperasi dan usaha kecil dan menengah mesti dikembangkan di seluruh tanah air agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang bisa berusaha.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari tulang punggung pengembangan ekonomi di Indonesia. PKL sangat membantu menghidupkan perekonomian domestik di daerah. Namun seringkali keberadaan PKL dianggap sebagai pembawa atau pembuat masalah seperti mengganggu ketertiban, keamanan, dan kebersihan (K3). Namun walaupun pedagang kaki lima sering dianggap mengganggu K3 ataupun lalu-lintas, akan tetapi di sisi lain usaha ini sebenarnya dapat memberikan keuntungan ekonomis

keluarga pedagang bahkan juga para karyawannya. Artinya profesi PKL sebenarnya juga ikut menunjang program pembangunan, terutama dalam penanggulangan pengangguran, karena profesi ini memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi "pengusaha" ekonomi lemah ini.

Pengusaha jenis ini memang sering dihadapkan pada persoalan yang cukup sulit antara melanggar ketertiban dan mencari nafkah (makan). Dengan kata lain tidak makan sama sekali atau makan tetapi melanggar peraturan, sehingga urusan melanggar atau setidaknya dapat dianggap melanggar peraturan menjadi nomor dua.

Profesi PKL di Indonesia memang sering menjadi masalah. Halomoan Tamba dan Saudin Sijabat¹² mengungkapkan bahwa PKL yang dikelompokkan dalam sektor informal sering dijadikan sebagai kambing hitam dari penyebab kesemrawutan lalu lintas maupun tidak bersihnya lingkungan. Meskipun demikian PKL ini sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau menjadi *safety belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah. Pada umumnya sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup *survive* dibandingkan sektor usaha yang lain.

¹¹ Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat. 2009. *Op cit*.

¹² Halomoan Tamba dan Saudin Sijabat. 2006. "Pedagang Kaki Lima: Entrepreneur Yang Terabaikan" dalam *Infokop* Nomor 29 Tahun XXII, 2006

Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal relatif lebih *independent* atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya. Bukti-bukti tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan sebagai PKL merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima. Dalam hal ini PKL mampu bertahan hidup dalam berbagai kondisi, sekalipun kondisi krisis ekonomi.

Eksistensi sektor informal seperti PKL memiliki peran penting sebagai penyangga distorsi sistem ekonomi. Namun disaat yang sama, ekonomi informal juga merupakan masalah, sehingga perlu direspon dengan politik ekonomi dan kebijakan yang tepat. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah melalui Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan fasilitasi Bantuan Perkuatan Sarana Usaha sebagai stimulator dan katalisator bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Program ini sudah berjalan dua tahun anggaran. Dalam program tersebut, Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersinergi dengan Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota untuk memberdayakan PKL melalui Koperasi. Dengan pola ini diharapkan PKL dapat menjadi suatu solusi dalam memecahkan penumbuhan usaha baru sekaligus akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan. Konsep perencanaan tata ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL. Kegiatan-kegiatan perkotaan didominasi oleh sektor-sektor formal yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Alokasi ruang untuk sektor-sektor informal, termasuk PKL, adalah ruang marginal. Sektor informal terpinggirkan dalam rencana tata ruang kota yang tidak didasari pemahaman informalitas perkotaan.

Selanjutnya, PKL sering dipandang sebagai sektor informal yang berada di luar kerangka hukum dan pengaturan. Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006. Akibatnya penataan berupa kepastian usaha dan tempat menjadi terabaikan. Apabila kita dapat menerima alur pikir dan fakta yang disajikan di atas bahwa PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional khususnya dalam penyerapan tenaga kerja maka PKL sangat berhak memperoleh kenyamanan berusaha berupa penciptaan iklim berusaha yang kondusif dari pemerintah. Dalam konteks ini, Kementerian Koperasi dan UKM menawarkan kerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten/propinsi program penataan & pemberdayaan PKL yang dilakukan melalui pendekatan kelembagaan Koperasi. Jadi kelompok PKL yang tadinya berhimpun dalam bentuk paguyuban, kelompok,

atau sentra diarahkan menjadi lembaga yang berorientasi peningkatan kesejahteraan ekonomi¹³

Program Registrasi PKL dan Pemberian Bantuan/Pinjaman terhadap PKL

Sejak tahun 2008 lalu Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program Registrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diiringi dengan pemberian bantuan bagi para PKL. Program yang diluncurkan oleh Dinas Koperindag Provinsi Sumbar ini diawali dengan meregistrasi 1.000 PKL di lima kota di Sumatera Barat yaitu kota Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Batusangkar dan kota Sawahlunto¹⁴.

Memasuki tahun kedua (2009), Dinas Koperindag Sumatera Barat kembali meregistrasi 4.000 PKL yang tersebar di 16 kabupaten/kota di Sumatra Barat. Setiap PKL diberikan perkuatan modal usaha berupa pinjaman lunak dengan bunga maksimal enam persen (6%) setahun. Melalui program bantuan ini setiap PKL diberikan bantuan perkuatan modal sebesar Rp. 300.000 per orang.

Terobosan Dinas Koperindag Sumbar ini, ternyata tak hanya disambut antusias oleh para PKL, tetapi juga dikagumi oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menekop UKM Suryadharma Ali. Ketika *melaunching* registrasi 4.000 PKL di halaman kantor gubernur Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei

2009 lalu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa PKL jangan dianggap sebagai pembuat masalah. Tetapi malah PKL justru harus dilegalkan, diberikan tempat berusaha yang jelas, aman dan nyaman, serta dipermudah akses permodalan mereka sehingga mereka mempunyai kepastian berusaha¹⁵.

Program Registrasi PKL dipandang sangat tepat dalam rangka membangkitkan semangat dan motivasi para PKL dalam menjalankan usahanya. Dengan program ini mereka diharapkan mampu berkembang dan berdaya. Apalagi di tengah krisis ekonomi saat ini tidak sedikit pekerja korban PHK di sektor formal yang turun langsung untuk menjadi PKL demi menyambung hidup bagi keluarga mereka. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatra Barat melalui Dinas Koperindag ini sangat penting peranannya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, melalui program registrasi PKL ini Pemerintah Daerah akan memiliki *database* yang lengkap tentang para PKL sehingga memudahkan Pemerintah Daerah mengarahkan bantuan serta memantau perkembangan mereka. Bahkan tidak hanya Pemerintah Daerah, instansi dan perusahaan lain, misalnya perbankan yang ada di daerah, hendaknya juga memiliki *database* tentang PKL, sehingga pihak perbankan akan mudah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) atau pinjaman, komersial lainnya kepada para PKL.

Bantuan kredit lunak yang diberikan kepada para PKL

¹³Halomoan Tamba dan Saudin Sijabat. 2006. *Opcit*.

¹⁴ Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat. 2009. *Op cit*.

¹⁵ *Ibid*

dimaksudkan sebagai stimulus atau pendorong dengan harapan agar para PKL penerima bantuan dapat berkembang dengan sukses, cepat naik kelas dikemudian hari, terbebas dari lilitan rentenir, sekaligus mampu membesarkan koperasi penyalur. Disamping itu, program registrasi dan bantuan bagi para PKL menurut rencananya juga akan diiringi dengan program pelatihan terhadap PKL.

Hal ini dimaksudkan agar dana perkuatan modal yang diberikan akan lebih berdaya guna dan pada gilirannya akan mampu mempercepat PKL untuk naik kelas. Oleh karena itu, peranan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu untuk melakukan pembinaan yang berkelanjutan, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun dalam hal pembinaan lokasi tempat PKL menjalankan usahanya. Program pembinaan berkelanjutan dalam maksudnya adalah bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota hendaknya menyiapkan program pembinaan dalam jangka waktu tertentu agar tidak terputus di tengah jalan, mengingat akan adanya pergantian Bupati/Walikota beberapa tahun ke depannya.

Program pengembangan sektor informal PKL menurut Ananta dan Supriyatno¹⁶ membutuhkan tiga hal yang harus diperhatikan dalam menertibkannya, yaitu: 1) Usaha di sektor ini harus dilindungi dari hambatan yang tidak perlu seperti pungutan liar, pemerasan, dan lain sebagainya. 2) Pembinaan hendaknya

jangan sampai mematikan kreativitas yang merupakan ciri mereka. 3) Perlu diperhatikan penyediaan tempat-tempat tertentu dan jam-jam tertentu bagi para PKL dengan penyediaan penerangan dan sarana kebersihan yang memadai.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Karena penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengidentifikasi dan memetakan gambaran tingkat motivasi para PKL dan dampak pemberian bantuan PKL terhadap tingkat motivasi para PKL, maka penelitian ini cenderung bersifat deskriptif eksploratif. Selain itu, karena tingkat motivasi yang dimiliki oleh para PKL sangat luas cakupannya maka dengan berbagai pertimbangan dan keterbatasan, *scope* penelitian ini dibatasi pada pemetaan tingkat motivasi para PKL dalam kaitannya dengan program pemberian bantuan PKL di tiga kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Payakumbuh, Bukittinggi, dan Padang Panjang.

Sesuai dengan karakteristik penelitian *field research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) wawancara mendalam (*in depth interview*) dan terstruktur dan 2) Studi Dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi: 1) Kepala Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat; 2) Kepala Bagian dan para staf pada Bagian Pembinaan Modal Usaha Kecil Menengah (PMUKM) pada Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat; 3) Para pengurus koperasi yang

¹⁶ Ananta dan Supriyanto. 1985. "Penelitian tentang Sektor Informal" Dalam *Jurnal Ekonomi UGM*. Yogyakarta.

mengelola program registrasi dan pemberian bantuan PKL di 3 kota yang menjadi sasaran program; dan beberapa orang perwakilan PKL di 3 kota yang menjadi sasaran program. Sementara yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para PKL yang menjadi peserta program registrasi dan bantuan PKL di tiga kota dari tiga kota yang menjadi sasaran program pemberian bantuan PKL.

Penelitian ini menetapkan tiga dari lima daerah kabupaten/ kota sasaran program registrasi PKL 2008 sebagai lokasi (objek) dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah seluruh PKL yang mengikuti program registrasi dan pemberian bantuan PKL tahun 2008 di ketiga kota tersebut di atas. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan penetapan sampel responden dilakukan secara sensus. Artinya seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel atau responden penelitian. Analisis penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap dengan menggunakan analisis model interaktif seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan informan (*emik*) yang sudah divalidasi dengan menggunakan metode triangulasi, terutama terhadap data yang bersifat kualitatif. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan terkait pada gabungan

data yang didapat dari informan (*emik*) dan responden, serta interpretasi peneliti (*etic*) terhadap data lapangan tersebut. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif atau angka-angka diolah dengan menggunakan rumus statistik sederhana dalam bentuk frekuensi dan persentase.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi PKL Sumbar Teregistrasi Tahun 2008

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab tiga tentang Metode Penelitian pada bagian *Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian* bahwa penelitian ini dilakukan pada tiga (3) daerah kota yang menjadi sasaran program registrasi PKL 2008. Populasi penelitian ini adalah seluruh PKL yang mengikuti program registrasi PKL 2008. Pemilihan sampel responden dilakukan secara *sensus*. Sedangkan pemilihan informan dilakukan secara *purposive*. Namun karena berbagai keterbatasan maka sampel responden yang berhasil didata dan dijadikan responden dalam penelitian hanya sejumlah 434 orang. Responden atau PKL yang dinyatakan aktif (terdata) dan dianalisis dalam penelitian ini hanya sejumlah 434 orang. Gambaran keaktifan PKL yang telah teregistrasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 1. PKL Teregistrasi Sumbar tahun 2008 yang Terdata

No.	Kota	Teregistrasi	Terdata		Tidak Terdata	
			f	%	f	%
1	Bukittinggi	202	182	90,10	20	9,90
2	Payakumbuh	191	169	88,48	22	11,52
3	Padang Panjang	200	83	41,50	117	58,50
Jumlah		593	434	73,19	159	26,81

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa para PKL atau responden yang berhasil diidentifikasi (aktif) pada daerah sasaran program adalah: Kota Bukittinggi 90,10%, Kota Payakumbuh 88,48%, dan Kota Padang Panjang 41,50%. Sehingga secara keseluruhan total responden atau PKL yang berhasil diidentifikasi adalah sebanyak 73,19 % atau 434 orang. Sedangkan responden yang tidak bisa diidentifikasi (tidak terdata) ada sebanyak 26,81 % atau 159 orang, dengan rincian masing-masing: Kota Bukittinggi 9,90%, Kota Payakumbuh 11,52%, dan Kota Padang Panjang 58,50%.

Bantuan Modal bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Tahun 2008

Berdasarkan kebijakan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sumatera Barat maka setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) diberikan bantuan modal sebesar Rp. 300.000 per orang. Program bantuan modal bagi PKL ini dimaksudkan sebagai cara atau alat untuk memotivasi para PKL agar lebih termotivasi dalam menjalankan profesinya sebagai PKL.

Melalui program Registrasi dan Bantuan Modal PKL tahun 2008 ini pihak Koperindag Provinsi Sumatera

Barat telah memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada para PKL yang telah diregistrasi sebanyak Rp. 300.000,- per PKL melalui koperasi masing-masing daerah (Kota/Kabupaten) untuk program registrasi tahun 2008. Program registrasi dan pemberian bantuan untuk tahun 2008 ini meliputi para PKL di lima (5) kota/kabupaten, yaitu: Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padangpanjang, Kota Batusangkar, dan Kota Sawahlunto. Bantuan (pinjaman) ini diharapkan akan dapat memotivasi dan lebih memberdayakan para PKL dalam meningkatkan atau mengembangkan usahanya di masa yang akan datang. Namun, agar program pemberian bantuan PKL yang telah dilakukan oleh Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan memotivasi para PKL maka telah dilakukan evaluasi terhadap efektifitas dan kemanfaatan dari program yang telah diterapkan tersebut. Salah satu bentuk tolok ukur yang digunakan dalam melihat efektifitas dan kemanfaatan bantuan tersebut adalah dengan cara melihat pergerakan (perkembangan) modal PKL yang menerima bantuan tersebut setelah mereka menerima bantuan.

Untuk melihat pergerakan (perkembangan) modal PKL setelah menerima bantuan dan menja-

lankannya selama setahun (2008 – 2009) dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Deskripsi Pergerakan Modal PKL di Kota Payakumbuh, Bukittinggi, dan Padangpanjang Tahun dari Tahun 2008 – 2009 (dalam rupiah)

Jumlah Modal (rupiah)	Kota Payakumbuh		Bukittinggi				Padangpanjang							
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009				
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
≤ 100 ribu	4	2,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,21	0	0
101 ribu – 500 ribu	10	5,92	0	0	2	1,10	0	0	21	25,30	65	78,31		
501 ribu – 1 juta	14	8,28	2	1,18	5	2,75	0	0	6	7,23	12	14,46		
> 1 juta – 3 juta	30	17,75	12	7,10	13	7,69	0	0	39	46,99	6	7,23		
> 3 juta – 5 juta	20	11,83	36	21,30	21	11,54	9	4,94	10	12,05	0	0		
> 5 juta – 10 juta	32	18,94	49	28,99	41	22,53	37	20,33	2	2,41	0	0		
> 10 juta	59	34,91	70	41,42	100	54,95	36	74,73	4	4,82	0	0		
Jumlah	169	100,00	169	100,00	182	100,00	182	100,00	83	100,00	83	100,00		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dipahami bahwa ternyata pergerakan modal para pedagang kaki lima di dua kota, yaitu Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi cenderung menaik atau bertambah setelah mendapatkan bantuan modal. Sementara pergerakan modal pedagang kaki lima di Kota Padang Panjang cenderung menurun

atau berkurang setelah mendapat bantuan modal.

Selanjutnya bila dilihat persentase pergerakan modal para pedagang kaki lima di masing-masing daerah sasaran penelitian ini maka didapatkan gambaran rekapitulasi seperti tertera pada tabel 3 berikut ini

Tabel 3. Keadaan Persentase Pergerakan Modal PKL Sumbar 2008

No	Pergerakan Modal dalam %	Kota/Kabupaten	PYK	BKT	PP	Jumlah	
						f	%
1	Di atas 21%		86	77	12	175	40,32
2	0 sampai 20 %		6	10	0	16	3,69
3	0%		47	59	3	109	25,12
4	sama dan kurang dari -1 %		30	36	68	134	30,87
6	Jumlah		169	182	83	434	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Secara umum dapat dikatakan bahwa pergerakan modal PKL yang teregistrasi pada tahun 2008 di

Provinsi Sumatera Barat cukup baik, meskipun tidak bisa dikatakan sangat baik. Sebagaimana terlihat pada tabel

3 di atas, pergerakan modal PKL yang berkisar di atas 20% cukup besar, atau setidaknya-tidaknya lebih besar dari pada frekuensi pergerakan modal lainnya, yaitu sekitar 40,32% atau 175 orang. Sementara itu pergerakan modal menurun yang kurang dari atau sama dengan -1%, ataupun yang tidak mengalami pergerakan modal juga masih sangat besar. Hal itu terlihat dari tabel 17 yang mengungkapkan bahwa 25,12% PKL atau 109 orang PKL di 3 Kota Sumatera Barat yang menjadi sasaran program registrasi PKL tidak mengalami pergerakan modal sama sekali. Sementara 30,87% atau 134 orang di antaranya

malah mengalami pergerakan modal menurun sampai di -1%.

Gambaran Tingkat Motivasi PKL Penerima Bantuan Modal PKL tahun 2008

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa program bantuan modal bagi PKL ini dimaksudkan sebagai cara atau alat untuk memotivasi para PKL agar lebih termotivasi dalam menjalankan profesinya sebagai PKL. Namun, sejauhmana bantuan modal tersebut telah berhasil membangkitkan motivasi mereka dalam menjalankan profesi mereka dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Deskripsi Tingkat Motivasi PKL Penerima Bantuan Modal PKL tahun 2008 di Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, dan Kota Padangpanjang

Tk. Motivasi	Kota Payakumbuh		Bukittinggi		Padangpanjang		Keterangan
	f	%	f		f	%	
Sangat Tinggi (5)	0	0	0	0	0	0	Dianalisis dari data mentah
Tinggi (4)	0	0	52	28,57	12	14,46	
Sedang (3)	29	17,16	118	64,84	38	45,78	
Rendah (2)	82	48,52	12	6,59	25	30,12	
Sangat Rendah (1)	58	34,32	0	0	8	9,64	
Jumlah	169	100,00	182	100,00	83	100,00	

Tabel 4 di atas menggambarkan bahwa tingkat motivasi PKL yang teregistrasi dan mendapatkan bantuan modal pada tahun 2008 di tiga kota yang menjadi sasaran penelitian ini lebih banyak berada pada kategori “sangat rendah”, “rendah”, dan “sedang”. Tidak seorang pun dari mereka yang mengungkapkan bahwa motivasi mereka berada pada kategori “sangat tinggi”.

Hal ini terlihat dari data tabel 4 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar PKL mengungkapkan bahwa tingkat motivasi mereka untuk berdagang sebagai PKL setelah menerima bantuan adalah “rendah” (48,52%) dan “sangat rendah” (34,32%) untuk PKL Kota Payakumbuh. Sementara untuk PKL Kota Bukittinggi, 64,84% dari mereka mengungkapkan bahwa motivasi mereka untuk berdagang setelah

mendapatkan bantuan modal berada pada kategori “sedang” dan hanya 28,57% dari mereka yang mengatakan bahwa motivasi mereka “tinggi” setelah mendapat bantuan. Sedangkan untuk PKL di Kota Padangpanjang, 45,78% dari mereka mengungkapkan bahwa motivasi mereka berada pada kategori “sedang” dan 30,12% dari mereka mengatakan bahwa motivasi mereka “rendah” untuk berdagang setelah mendapat bantuan modal.

Deskripsi data diatas antara lain juga berarti bahwa kontribusi pemberian bantuan modal PKL kepada para pedagang kaki lima di daerah sasaran penelitian ini kurang begitu berarti dalam memotivasi mereka untuk lebih giat mengembangkan usaha atau profesi mereka. Pernyataan ini juga diperkuat oleh beberapa informasi yang diperoleh dari beberapa responden (PKL) dan informan lainnya bahwa mereka atau PKL merasa kurang termotivasi dengan jumlah atau besaran bantuan modal yang diberikan. Jumlah bantuan yang mereka terima sebagai pinjaman dari Koperindag Provinsi Sumatera Barat tersebut menurut mereka tidak begitu berarti (tidak begitu signifikan) dalam meningkatkan motivasi mereka untuk lebih mengembangkan usaha atau profesi mereka sebagai PKL. Mereka beranggapan bahwa jumlah bantuan tersebut terlalu kecil. Mereka mengharapkan bahwa bantuan modal tersebut kalau bisa ditambah atau lebih besar dari yang sudah diberikan.

Berdasarkan pendataan atau penjabakan harapan para PKL melalui penelitian ini terdapat indikasi bahwa bantuan yang mereka harapkan

berkisar pada angka atau jumlah yang beragam, mulai dari 500 ribu rupiah sampai 10 juta rupiah, sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha yang mereka jalani. Bila diambil patokan secara umum tentang harapan bantuan yang mereka inginkan, terdapat kalkulasi bahwa rata-rata harapan bantuan yang mereka inginkan adalah sekitar 2 juta rupiah.

Berdasarkan hasil penelitian ini tergambar bahwa sebagian besar (sekitar 29%) dari PKL menginginkan agar mereka dibantu minimal 1 juta rupiah. (atau bila dilihat dari rata-rata bantuan yang mereka inginkan adalah sekitar 1.994.333 rupiah). Ada pula mereka yang menginginkan agar mereka dipinjamkan minimal 2 atau 3 juta rupiah. Bahkan ada ada pula yang menginginkan pinjaman yang lebih besar lagi, yaitu sekitar 10 juta rupiah.

Sebagian besar PKL merasakan bahwa bantuan atau pinjaman sebesar 300 ribu rupiah cukup kecil, bahkan sangat kecil, kontribusi atau manfaatnya bagi menunjang atau mengembangkan usaha mereka. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang masih terperangkap oleh rentenir karena masih tidak cukupnya pinjaman modal dari pihak Koperindag. Hal ini antara lain terungkap dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa PKL, terutama PKL di Kota Padang Panjang.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya antara lain dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat motivasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) Sumatera Barat dalam menjalani pekerjaan mereka sebagai PKL cenderung rendah setelah mereka menerima bantuan modal PKL 2008 dari Dinas Koperindang. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan bahwa motivasi sebagian besar mereka setelah menerima bantuan modal tersebut sebagian besar hanya berkisar pada kategori "sangat rendah", "rendah", dan "sedang".
2. Dampak pemberian bantuan PKL terhadap peningkatan motivasi para PKL dalam menjalani pekerjaan mereka sebagai PKL boleh dikatakan sangat minim karena berdasarkan persentase jawaban yang diberikan oleh responden terindikasi bahwa tingkat motivasi mereka setelah menerima bantuan modal tersebut sebagian besar berada pada kategori "sangat rendah", "rendah", dan "sedang". Hal ini diduga ada kaitannya dengan kecilnya jumlah bantuan yang mereka terima sehingga mereka tidak merasa begitu terbantu atau termotivasi oleh adanya bantuan tersebut
3. Pergerakan modal PKL dari sebelumnya, setelah mendapatkan pinjaman lunak (Rp. 300.000) dari Koperindag Provinsi Sumbar melalui koperasi mereka pada masing-masing kota sangat beragam; ada pergerakan modal yang telah meningkat mencapai di atas 20%; ada pula yang meningkat hanya sampai di bawah 20%; dan ada pula pergerakan modal yang statis dan

negatif; bahkan ada pula yang mengarah pada penyusutan modal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat direkomendasikan/disarankan bahwa:

1. Untuk meningkatkan motivasi para PKL dalam mengembangkan usahanya maka diperlukan peningkatan jumlah pinjaman lunak sesuai dengan harapan dan jenis usaha yang mereka jalani. Artinya, secara khusus dapat pula disesuaikan dengan skala usaha mereka, yaitu bergerak antara 500 ribu rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Disamping itu juga diperlukan pembinaan secara berkelanjutan, baik mengenai manajemen usaha, semangat usahawan, maupun mengenai training dalam bentuk klinik usaha.
2. Selain itu perlu pula adanya strategi dan kebijakan pengembangan PKL meliputi perlindungan hukum dan ruang usaha (*space*), pengembangan kemampuan serta pengembangan potensi para PKL. Ketiga jenis pengembangan tersebut hendaknya dilakukan secara sinergik, saling kait-mengait dan saling mendukung agar kemampuan PKL layak ditingkatkan.
3. Mengingat hasil analisis dalam penelitian ini dilakukan terhadap data yang sangat terbatas, maka yang dapat dilakukan adalah memberikan informasi mengenai deskriptif analitik, sehingga belum dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan yang

bersifat final. Oleh karena itu, studi yang lebih mendalam dan komprehensif masih perlu

dilakukan untuk mempertajam hasil analisis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali Djoefri Chozin Soen'an. 1992. "Perilaku Sektor Informal Pedagang kaki Lima dalam Pemasaran". Laporan Penelitian: UGM Yogyakarta.
- Ananta dan Supriyanto. 1985. "Penelitian tentang Sektor Informal" Dalam *Jurnal Ekonomi UGM*. Yogyakarta.
- Diah Ayu Ardiyanti. 2006. "Kehidupan Pedagang Kaki Lima dalam Meraih Keberhasilan Mempertahankan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Sekitar GOR Manahan Surakarta tahun 2005-2006)" Laporan Penelitian.
- Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat. 2009. *Forum Koperasi*. Edisi. Juli, 2009 .
- Effendi, Tadjudin Noer.1992: *Perilaku Mobilitas dan Struktur Sosial Ekonomi Rumah Tangga: Kasus Dua Desa di Jawa Barat*, Yogyakarta: PPK UGM
- Halomoan Tamba dan Saudin Sijabat. 2006. "Pedagang Kaki Lima: Entrepreneur Yang Terabaikan" dalam *Infokop* Nomor 29 Tahun XXII, 2006
- Mulyanto. 2007. "Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survei pada Pusat Perdagangan dan Wisata di Kota Surakarta)" dalam *Jurnal BENEFIT*, Vol. 11, No. 1, Juni 2007.
- Sethuraman, S.V. 1981. *The Urban Informal Sector in Developing Countries, Poverty, and Environment*. Chapter 14, Geneva: ILO.
- Siagian, P. Sondang. 1997. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wardoyo. 2008. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Manahan Surakarta" <http://www.osun.org/usaha+kaki+lima-doc.html> diakses tanggal 12 November 2009).

